

KEBERLANJUTAN YURISDIKSI

Hal Mendasar bagi Praktisi

PENDAHULUAN

Keberlanjutan yurisdiksi tercapai ketika keseluruhan geografi politik berhasil menyelesaikan transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yurisdiksi tidaklah mudah maupun cepat. Dokumen ini bertujuan menyoroti beberapa elemen penting dalam strategi sukses mencapai keberlanjutan yurisdiksi. Hal tersebut dibangun berdasarkan kelanjutan dua dialog *roundtable* bersama pemangku kepentingan (Januari 2015 dan Juni 2016) yang diadakan oleh *Forests, Farms and Finance Initiative (3FI)*¹; serta kajian yang baru saja diterbitkan mengenai manajemen lanskap terpadu dan pendekatan yurisdiksi (Lampiran 1).

1 *Forests, Farms and Finance Initiative* dipimpin oleh Earth Innovation Institute dan beranggotakan: Bonsucro, Denofa, Forest Trends, Governors' Climate and Forests task force, Global Roundtable for Sustainable Beef, Grupo Amaggi, Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, INOBU, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Proforest, Roundtable for Responsible Soy, Roundtable for Sustainable Palm Oil, Solidaridad, dan Unilever. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: forestsandfinance.org

APAKAH KEBERLANJUTAN YURISDIKSI ITU?

Kami mendefinisikan *keberlanjutan yurisdiksi* sebagai transisi yang berhasil untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan—meliputi dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi²—di seluruh wilayah geografis politik, seperti negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau negara³. Keberhasilan transisi diukur “dari ujung-ke-ujung” di seluruh tingkat yurisdiksi, meliputi seluruh rentang kegiatan, sistem-sistem produksi, ekosistem, dan aktor.

Keberlanjutan yurisdiksi dapat dicapai melalui *pendekatan yurisdiksi* yang merupakan bagian kategori lebih luas dari manajemen lanskap terpadu namun dengan fitur pembeda penting dimana lanskap ditentukan oleh batas-batas kebijakan yang relevan serta strategi utama yang dirancang untuk mencapai kadar keterlibatan pihak pemerintah hingga tingkat yang lebih tinggi (Lihat Lampiran 2 untuk tipologi pendekatan terhadap pembangunan perdesaan berkelanjutan).

2 Sesuai definisi ini, pembangunan dapat disebut berkelanjutan jika bisa memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merusak kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya (dikutip dari Our Common Future).

3 Yurisdiksi juga bisa ditentukan oleh perbatasan alami, seperti daerah aliran sungai, jika ada kebijakan publik relevan yang dijalankan di tingkat ini.

Organisasi berikut mempunyai peran dan kontribusi atas pembuatan dokumen ini. Meskipun organisasi berikut masuk kedalam daftar, tidak berarti bahwa organisasi tersebut menyetujui semua poin yang disampaikan dalam dokumen ini.



Pendanaan diberikan oleh NORAD, Gordon and Betty Moore Foundation, serta Grantham Foundation



UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT,
HUBUNGI DANIEL NEPSTAD
dnepstad@earthinnovation.org

TEORI PERUBAHAN

Keberlanjutan yurisdiksi bisa dicapai saat sektor-sektor penting menyamakan definisi sukses, saat kekuatan politik dan ekonomi dari mereka yang menginginkan keberlanjutan yurisdiksi cukup untuk mendorong perubahan, serta ada strategi dan rencana yang layak untuk mendukung transisi. Keberlanjutan yurisdiksi menjadi kuat saat keadaan yang mempertahankannya diterapkan dalam kebijakan publik, model bisnis, dan penetapan lahan secara formal. Keberlanjutan semakin kuat saat manfaatnya dirasakan secara luas, seperti akses lebih besar ke pasar dan keuangan, lapangan kerja baru, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, lebih melimpahnya sumber daya alam, serta lingkungan yang lebih sehat dan kuat.

VISI

Keberlanjutan yurisdiksi menjadi norma yang baru ketika manfaatnya secara substansi secara luas diterima oleh pemilih dan konstituen setempat, sehingga menjadi fitur utama dalam kampanye pejabat publik dan model bisnis di kawasan tersebut. Inovasi yang berhasil di yurisdiksi yang berkinerja tinggi akan ditiru dan direplikasi oleh pihak yang berkinerja lebih rendah, dan menciptakan persaingan yang baik dan sehat.

APAKAH PENDEKATAN YURISDIKSI MENGANTI PENDEKATAN TINGKAT PETANI DAN PROSESOR?

Tidak. Pendekatan yurisdiksi paling tepat dilihat sebagai pelengkap penting terhadap intervensi pada tingkat petani dan prosesor. Intervensi pada tingkat petani dan prosesor sebagai pendorong dan pengukur kemajuan menuju keberlanjutan akan selalu diperlukan. Bantuan teknis, keuangan, penegakan hukum, dan intervensi lainnya penting untuk mendorong perubahan perilaku petani dan prosesor. Pemantauan di tingkat ini diperlukan guna mengidentifikasi dan memberi insentif bagi yang mempunyai performa tinggi, serta untuk mengidentifikasi dan mereformasi *free rider*. Beberapa pembeli akan selalu mewajibkan adanya dimensi keberlanjutan kepada pemasok yang dimana hanya dapat diukur di tingkat petani atau prosesor⁴.

MENGAPA PERLU PENDEKATAN YURISDIKSI?

- **Pemerintah pada akhirnya harus efektif:** Kebijakan publik yang kuat, lembaga pemerintah yang efektif, dan supremasi hukum diperlukan dalam jangka panjang untuk menciptakan kondisi pemungkin untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan luas. Namun, sejarah panjang atas kinerja pemerintah daerah yang mengecewakan mendorong komunitas pembangunan berkelanjutan mengarah pada pendekatan yang tidak tergantung dengan peran pemerintah. Pendekatan

yurisdiksi dirancang untuk mendukung sejumlah besar pemimpin pemerintah yang kini semakin tertarik mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

- **Konvergensi dan keselarasan:** Yurisdiksi REDD sertifikasi tingkat petani dan prosesor, kebijakan publik domestik, dan komitmen perusahaan akan input produksi non-deforestasi, akan mendukung transisi kawasan hutan tropis menuju pembangunan berkelanjutan, seringkali melalui penekanan kuat pada pengurangan deforestasi. Kurangnya keselarasan⁵ di antara berbagai pendekatan menjadi penghambat kemajuan. Penyelarasan ini dapat dicapai melalui pendekatan yurisdiksi.
- **Penurunan biaya:** Pendekatan yurisdiksi dapat menurunkan biaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu kawasan. Melalui pendekatan yurisdiksi, dimungkinkan adanya insentif yang kuat serta mekanisme pembagian biaya yang dapat mendorong tindakan kolektif dan interaksi positif antar petani-ke-petani atau bisnis-ke-bisnis.
- **Memungkinkan sertifikasi yang lebih luas:** Dengan meningkatkan keberlanjutan semua sistem produksi dan pemrosesan melalui kebijakan publik, insentif, dan penegakan hukum, pendekatan yurisdiksi menjadikan sertifikasi dengan standar internasional dapat dimungkinkan bagi petani dan prosesor dalam jumlah yang lebih besar.



5 Kurangnya keselarasan ini termasuk perbedaan metrik yang dipakai untuk mengukur kinerja (misalnya tutupan hutan, taraf deforestasi bersih, zona larangan, daerah bernilai konservasi tinggi, hutan stok karbon tinggi), perbedaan unit kinerja spasial (misalnya lahan tani, daerah aliran sungai, kecamatan), dan asumsi dasar (misalnya persepsi petani sebagai mitra penting vs agen bermasalah yang perlu direformasi)

4 Contoh dimensi keberlanjutan tersebut termasuk praktik ketenagakerjaan dan penggunaan bahan kimia berbahaya.

APA SAJA TANTANGAN UTAMA PENDEKATAN YURISDIKSI?

- **Penerimaan:** Menggalang dukungan yang memadai dari pimpinan politik, pimpinan sektor pertanian, dan pimpinan bisnis
- **Kapasitas:** Lemahnya kapasitas kelembagaan badan pemerintah, bisnis, sektor tani, dan masyarakat madani
- **Perubahan politik:** Pemimpin yang kuat tergantikan melalui pemilihan pemimpin.
- **Keselaran pemerintahan:** Penolakan dari salah satu tingkat pemerintah atau suatu lembaga
- **Insentif negatif:** Kebijakan publik yang berlawanan dengan agenda keberlanjutan
- **Tak ada Insentif:** Kurangnya insentif positif untuk investasi pada praktik berkelanjutan dan barang publik
- **Tak ada hukuman:** Lemahnya aturan hukum untuk mendorong sistem produksi dan manajemen lahan yang berkelanjutan atau lemahnya penegakan aturan yang baik.
- **Tak ada sinyal pasar:** Sinyal yang kuat dan konsisten bahwa pembeli utama domestik maupun ekspor atas produk yurisdiksi tersebut menginginkan sumber yang berkelanjutan dan menerima definisi sukses yurisdiksi bersangkutan
- **Terlalu banyak metrik:** Beragam metrik untuk isu penting yang sama (misalnya deforestasi)
- **Keengganan:** Untuk bekerja sama antara perusahaan dengan pemerintah, satu sektor dengan sektor lainnya, petani dengan LSM dan banyak lagi.
- **Inklusi:** Petani, masyarakat adat, dan sektor lainnya dari penduduk kawasan itu sering kesulitan ikut serta dalam dialog multi pemangku kepentingan

APA SAJA ELEMEN KEBERHASILAN?

1. DEFINISI SUKSES BERSAMA

- **Sasaran dan penanda keberhasilan yang terikat waktu:** Untuk seluruh yurisdiksi
- **Kemajuan nyata:** Sasaran dan penanda keberhasilan mewakili kemajuan berarti menuju keberlanjutan yurisdiksi
- **Rasa memiliki masyarakat kawasan:** Pemangku kepentingan utama setempat/kawasan menerima dan mendukung.
- **Pengakuan internasional:** Diakui dan didukung oleh aktor eksternal penting dan, pada akhirnya,



memenuhi serangkaian prinsip atau “sistem peringkat” (Catatan: rangkaian prinsip internasional adalah bagian penting yang belum ada sejumlah inisiatif sedang dijalankan) paling penting bagi yurisdiksi yang bergantung ekspor

2. PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI (MRV)

- **Data yang baik:** Akurat, tepat waktu, dipercaya, imparial, dan akhirnya akan menjadi data “resmi”⁶. Lihat contoh sistem PRODES di Brasil, catatan kaki⁷.
- **Transparansi** Pelaporan tersedia *online*, di platform interaktif yang memfasilitasi visualisasi dan pencarian data, serta disesuaikan bagi beragam jenis pengguna (misalnya memungkinkan perusahaan menjustifikasi pilihannya mengambil pasokan dari kawasan tertentu)
- **Melampaui audit:** Audit tingkat petani untuk verifikasi akan menjadi penting. Namun, ada tren yang semakin mengandalkan data jarak jauh, pengumpulan data oleh pemerintah (misalnya produksi pangan, pelanggaran hukum tenaga kerja) dan pemantauan oleh warga untuk melacak kinerja. Verifikasi dapat lebih mengandalkan sistem laporan pengaduan dan investigasi formal.
- **Keterlacakan:** Perusahaan dan sistem pemantauan dapat melacak kembali asal-usul produk atau bahan produk di sepanjang rantai pasok.

⁶ “Resmi” mengacu pada data yang didukung pemerintah, yang menjadi dasar bagi kebijakan yang diambil.

⁷ Sebagai contoh, program pemantauan deforestasi Amazon di Brasil yang disebut PRODES, yang dirilis setiap tahun, telah memungkinkan berbagai inovasi yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan



3. SISTEM INSENTIF & BERBAGI BIAYA YANG TERPADU

- **Hukuman yang adil dan efektif:** Aturan hukum penggunaan lahan yang mudah dipahami, yang ditegakkan secara adil dan stabil sepanjang waktu (lihat catatan kaki⁸ dengan contoh Undang-Undang Hutan Brasil).
- **Perlunya insentif berganda:** Diperlukan sejumlah insentif—keuangan, administratif (seperti perampingan birokrasi), kontrak, penguasaan lahan
- **Bisnis dan petani yang berkelanjutan lebih kompetitif:** Kebijakan dan program memperbesar biaya bagi yang berkinerja rendah dan memperkecil biaya bagi yang berkinerja tinggi (Catatan: saat ini yang terjadi adalah kebalikannya).
- **Menjalin kesepakatan pasar:** Kesepakatan pasokan dari sumber berkelanjutan dengan pasar penting yang mencakup target seluruh yurisdiksi
- **Menarik investasi:** Menurunkan resiko, meningkatkan hasil
- **Membayar kinerja:** Prinsip insentif bagi kemajuan terukur di seluruh wilayah menuju sasaran dan penanda keberhasilan
- **Mendorong langkah bersama:** Sistem insentif yang mendorong langkah bersama untuk mengatasi deforestasi disaat yang sama mendukung petani dan masyarakat untuk menjalankan praktik berkelanjutan
- **Integrasi insentif:** Dicapai melalui rencana bisnis dan investasi yurisdiksi
- **Berbagi biaya sesungguhnya:** Insentif paling tepat dipandang dan didiskusikan sebagai mekanisme yang adil untuk berbagi biaya sesungguhnya atas transisi ke sistem produksi berkelanjutan⁹

⁸ Saat Undang-Undang Hutan Brasil diubah untuk meningkatkan tutupan hutan minimum dari 50% menjadi 80% bagi setiap pemegang hak, kredibilitasnya merosot tajam.

⁹ Ini penting karena berbagai manfaat produksi berkelanjutan diterima masyarakat luas, sementara biayanya sebagian besar ditanggung produsen.

4. STRUKTUR TATA KELOLA MULTI-SEKTOR

- **Perwakilan dan/atau kepemimpinan pemerintah:** Keterlibatan/dukungan termasuk lembaga (misalnya, pertanian, hutan, lingkungan, keuangan) dan tingkatan (misalnya Kabupaten, Provinsi, Pusat) yang penting
- **Perwakilan multi-pemangku kepentingan:** Perwakilan semua pemangku kepentingan utama
- **Efisiensi:** Mekanisme untuk memastikan efisiensi, terutama saat pemerintah mengambil peran kepemimpinan
- **Ketahanan:** Sengaja dirancang untuk memastikan kontinuitas seluruh transisi politik dan siklus pemilu
- **Jaringan:** Membangun dan memperkuat jaringan hubungan dan kerja sama di antara pegawai negeri, bisnis, sektor pertanian, dan mitra masyarakat madani—sebagai pondasi utama ketahanan
- **Pragmatisme:** Tidak harus sempurna untuk maju
- **Mengelola konflik:** Perbedaan kepentingan dan konflik di antara peserta seharusnya tidak mengganggu kerangka tata kelola

JALUR (lihat contoh di Lampiran 3)

Ketiga jalur menuju keberlanjutan yurisdiksi ini tidak terpisah satu sama lain. Sering kali transisi yurisdiksi dapat melibatkan 2 atau 3 jalur sekaligus, dengan tahapan yang berbeda.

1. SERTIFIKASI YURISDIKSI

- **Motivasi:** Proses multi-pemangku kepentingan dimotivasi kepentingan untuk memperoleh sertifikasi yurisdiksi (misalnya RSPO)
- **Asumsi:** Sertifikasi komoditas tunggal membawa manfaat lokal yang signifikan karena akan menjadi pondasi bagi sertifikasi ujung-ke-ujung untuk semua produksi dan keberlanjutan yurisdiksi

2. YURISDIKSI REDD¹⁰

- **Motivasi:** Proses para pemangku kepentingan yang timbul dari persepsi mengenai potensi manfaat program yurisdiksi REDD (misalnya *German REDD Early Mover*, *Forest Carbon Partnership Facility*, *Biocarbon Fund*, *UN REDD*, *Governors' Climate and Forests Task Force*, prospek pasar REDD California), serta aturan dan sistem yang telah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam program-program tersebut (misalnya perlindungan, tingkat referensi, MRV)
- **Asumsi:** Pembiayaan karbon dapat mendukung proses kesiapan; prospek pembiayaan berbasis kinerja sudah cukup untuk mendorong proses dan perubahan pemanfaatan lahan jika diatur dengan pasar dan investasi terkait

3. ENDOGEN

- **Motivasi:** Motivasi utama adalah komitmen kawasan terhadap keberlanjutan yang timbul dari pergerakan sosial, kepemimpinan politik, atau kepemimpinan korporasi, yang didorong oleh peluang eksternal (misalnya REDD, pasar) atau tanggapan terhadap peraturan/kebijakan publik (misalnya Programa Municipios Verdes). Banyak dari antara 25 negara bagian dan provinsi berhutan tropis dalam *Governors' Climate and Forests task force* masuk kategori ini, yang sebagiannya dimotivasi oleh kemitraan antar-pemerintah dan peluang politis.
- **Asumsi:** “Jika kita membangunnya, mereka akan datang dengan sendirinya.” Sukses dalam memperlambat deforestasi, mengakui hak tanah masyarakat adat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan akan meningkatkan kualitas hidup di yurisdiksi bersangkutan dan mungkin membawa akses pasar yang lebih baik beserta manfaat keuangan dan reputasi.

BAGAIMANA CARA MEMULAI TRANSISI KE KEBERLANJUTAN YURISDIKSI?

1. **Kekuasaan:** Memahami hubungan kekuasaan dan mengidentifikasi koalisi individu dan institusi yang dapat mendorong prosesnya
2. **Penggerak yang Netral:** Mengidentifikasi organisasi atau individu penggerak yang netral dan dipercaya banyak pemangku kepentingan.
3. **Isu yang Menyatukan:** Mengidentifikasi sejumlah isu bersama yang dapat menyatukan koalisi
4. **Pendukung:** Melibatkan pendukung potensial untuk mendorong proses, terutama melalui pemimpin politik atau pemimpin ekonomi yang dapat membawa peran pembeli, produsen, dan aktor penting lainnya.
5. **Keberhasilan Awal:** Membuat strategi untuk mencapai keberhasilan awal—manfaat nyata yang mengirimkan sinyal positif bagi mereka yang mendukung proses
6. **Koalisi Besar:** Membawa inisiatif yang sudah ada ke dalam koalisi—jika tidak, mereka dapat berubah menjadi lawan
7. **Tiga Alasan:** Menyiapkan alasan politik, alasan bisnis, dan alasan sosial yang mendukung keberlanjutan yurisdiksi
8. **Tetap Perhatikan Tujuan Utamanya:** Jangan lupa, ini adalah proses perubahan, bukan keadaan akhir yang harus segera dicapai

10 REDD adalah singkatan dari: Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan).

LAMPIRAN 1

SUMMARY OF RECENT ASSESSMENTS AND LITERATURE ON LANDSCAPE & JURISDICTIONAL APPROACHES THAT WERE REVIEWED FOR THIS REPORT.

1. Climate-Smart Landscapes and the Landscape Approach—An Exploration of the Concepts and their Practical Implications.

Kusters, K. 2015. *Wageningen, the Netherlands: Tropenbos International*.

Laporan ini mengkaji literatur mengenai semua hal yang tercakup dalam istilah ‘lansekap cerdas iklim (*climate-smart landscapes*)’ dan juga ‘pendekatan lanskap (*landscape approach*)’, serta menyoroti pertanyaan mengenai di mana saja diperlukan penelitian lebih lanjut. Wawancara dengan para ahli disertakan untuk melengkapi diskusi literatur Tropenbos International.

2. Connecting Financial Tools and Landscapes: Aggregators and Strategic Interventions.

Clarmondial, Credit Suisse, Climate Bonds Initiative, F3 Life. 2016. *Royal Society, London*.

Kertas putih ini memberikan gambaran umum lanskap keuangan dan implikasi mengenai bagaimana utang bisa dipakai membantu berbagai aktor dan kegiatan di dalam sebuah lanskap.

3. Early Lessons from Jurisdictional REDD+ and Low Emissions Development Programs.

Fishbein, G., D. Lee. 2015. *The Nature Conservancy*

Studi ini mempelajari bagaimana pendekatan yurisdiksi dikembangkan di delapan yurisdiksi geografis yang beragam, membandingkan status berbagai pendekatan tersebut saat ini dan pendorongnya, serta menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian dan praktik terbaik untuk masa depan.

4. Fostering Low-Emission Rural Development from the Ground Up.

Stickler, C. M. DiGiano, D. Nepstad, J. Hyvarinen, R. Vidal, J. Montero, A. Alencar, E. Mendoza, M. Benavides, M. Osorio, E. Castro, C. Mwangi, S. Irawan, O. Carvalho Jr., M. Becerra, D. McGrath, C. Chan, B. Swette, J. Setiawan, T. Bezerra, M. McGrath-Horn, J. Horowitz. 2014. *Sustainable Tropics Alliance*.

Laporan ini menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait penghambat utama di delapan kawasan tropis

dan peluang untuk mendorong pendekatan yurisdiksi atau pembangunan perdesaan beremisi rendah (LED-R).

5. How Sustainability Standards Can Contribute to Landscape Approaches and Zero Deforestation Commitments.

Mallet P., M. Maireles, E. Kennedy, M. Devisscher. 2016. *ISEAL Alliance, London*.

Dalam publikasi ISEAL Alliance baru-baru ini, penulis Patrick Mallet, Marta Maireles, Elizabeth Kennedy, dan Maira Devisscher memberikan garis besar mengenai standar keberlanjutan yang ada saat ini dan penerapannya terhadap pendekatan lanskap dan yurisdiksi, termasuk alat, kerangka, dan prakarsa yang relevan.

6. Integrated Landscape Approaches to Managing Social and Environmental Issues in the Tropics: Learning from the Past to Guide the Future.

Reed, J., J. Van Vianen, E. L. Deakin, J. Barlow, T. Sunderland. 2016. *Global Change Biology*, doi: 10.1111/gcb.13284.

Dalam studi ini, para penulisnya mempelajari dan mengkaji sejarah berbagai pendekatan lanskap, membandingkan pendekatan-pendekatan tersebut, dan bagaimana pendekatan itu sudah dan dapat diterapkan, dengan kesimpulan bahwa meskipun tetap ada penghambat yang signifikan, pendekatan semacam ini memiliki potensi besar.

7. Integrated Landscape Initiatives in Europe: multi-sector collaboration in multi- functional landscapes

Martin, M. G., Bieling, C., Hart A., Hart, Plieninger, T. *Land-Use Policy*, 58. 2016. 43-53. Elsevier

Makalah ini memberikan analisis sistematis mengenai berbagai prakarsa lanskap terpadu di Eropa dari segi pola organisasi, peserta, sumber daya, masalah, dan nilai lanskap yang ditangani.

8. Integrated Landscape Initiatives for African Agriculture, Development, and Conservation: A Region-Wide Assessment

Milder, J.C, Hart, A. K, Dobbie, P., Minai J., Zaleski, C. 2014. *World Development*, 54. 68-80. Elsevier

Studi ini menyurvei 87 prakarsa lanskap terpadu di 33 negara Afrika kawasan Sub-Sahara, memberikan gambaran di seluruh kawasan itu dalam kaitannya dengan konteks, motivasi, rancangan, partisipasi, dan hasil berbagai prakarsa tersebut.

9. Integrated Landscape Investments: How to Coordinate for Impact and Measure Effectiveness Across Landscapes.

EcoAgriculture Partners. 2015.

Dalam kertas putih ini, diidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan koordinasi investasi, pemfasilitasian pelibatan investor, dan pelacakan kemajuan serta imbal hasil dalam sebuah lanskap.

10. Integrated landscape management for agriculture, rural livelihoods, and ecosystem conservation: An assessment of experience from Latin America and the Caribbean

Estrada-Carmonaa, N., Hart A. K., DeClercke, F. A.J., Harvey, C. A., Milder, J. C. Landscape and Urban Planning 129. 2014. 1-11

Artikel ini memberikan kajian sistematis 104 manajemen lanskap terpadu di 21 negara Amerika Latin dan Karibia. Analisis tersebut mencakup karakteristik, hasil, konteks, motivasi, tujuan, pemangku kepentingan dan peserta, kegiatan dan investasi, serta keberhasilan utama dan kekurangannya.

11. Jurisdictional Approaches to Reducing Palm Oil Driven Deforestation in Indonesia: Scoping Study of Design Considerations and Geographic Priorities.

Daemeter Consulting. 2016.

Dalam laporannya kepada Packard Foundation, Daemeter Consulting membagikan temuan dan pembelajaran dari Indonesia terkait peluang dan tantangan yang ada di setiap tahapan langkah-demi-langkah pengembangan dan pelaksanaan program yurisdiksi (JP).

12. Jurisdictional Approaches to Zero Deforestation Commodities - WWF Discussion Paper

Wolosin, Micheal, Forest Climate Analytics on behalf of WWF US. 2016.

Makalah ini memberikan informasi dan analisis mengenai pendekatan yurisdiksi untuk dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan yang tertarik dan untuk mendorong diskusi lebih lanjut.

13. Jurisdictional Sustainability: Issues, Options and Recommendations for Accelerating the Transition to Sustainable, Equitable, Low-Emission Rural Development

Earth Innovation Institute. 2014.

Kertas putih ini menggali mengenai apa makna keberlanjutan yurisdiksi, mengusulkan Teori Perubahan (Theory of Change) untuk cara penerapan keberlanjutan yurisdiksi, menjabarkan tiga pilar terkait transisi ini (insentif; penanda keberhasilan dan metrik; serta pemantauan), dan mengevaluasi berbagai opsi untuk memberdayakan, merancang, dan mendorong proses keberlanjutan yurisdiksi secara global.

14. The Little Sustainable Landscapes Book: Achieving Sustainable Development Through Integrated Landscape Management.

Denier, L., S. Scherr, S. Shames, P. Chatterton, L. Hovani, N. Stam. 2015. *Global Canopy Programme: Oxford*.

Laporan yang kolaboratif dan mendalam ini menjabarkan berbagai elemen utama manajemen lanskap terpadu, menyoroti kebijakan dan tren teknologi terkait, mendiskusikan kondisi tata kelola dan keuangan saat ini yang mendorong kelayakan manajemen lanskap, serta menggunakan studi kasus untuk memperlihatkan berbagai aspek penerapan manajemen lansekap terpadu.

15. More Food, More Forest, Few Emissions, Better Livelihoods: Linking REDD+, Sustainable Supply Chains and Domestic Policy in Brazil, Indonesia and Colombia.

Nepstad, D., S. Irawan, T. Bezerra, W. Boyd, C. Stickler, J. Shimada, O. Carvalho Jr., K. MacIntyre, A. Dohong, A. Alencar, A. Azevedo, D. Tepper, S. Lowery. 2013. *Carbon Management*, 4(6), 639-658

Artikel ini membandingkan dan mengaitkan berbagai pendekatan untuk menjalankan pembangunan perdesaan beremisi rendah (LED-R), serta menggali potensi karakteristik dan peluang untuk Sistem Kinerja Yurisdiksi (JPS).

16. Reducing Risk: Landscape Approaches to Sustainable Sourcing.

Kissinger, G., A. Brasser, L. Gross. 2013. *Landscapes for People, Food and Na-ture Initiative, Washington, DC*.

Laporan ini mendukung alasan bisnis untuk pendekatan lansekap dengan menjelaskan bagaimana pendekatan ini bisa menjadi jawaban untuk mitigasi risiko rantai pasokan dalam skala besar, melampaui pertanian atau kilang individual.

17. Thinking Medium Before We Thing Big: The Role of Program-Related, Angel and Venture Capital in Financing Landscape Startups.

Nature Services Peru, Craigmore Sustainables, International Woodland Company. 2016. *Royal Society, London*.

Kertas Putih ini mulai menggali mengenai hubungan antara komunitas investasi keuangan dengan strategi keberlanjutan seperti manajemen lanskap terpadu.

LAMPIRAN 2

MEMBANGUN PEMAHAMAN BERSAMA MENGENAI PENDEKATAN BAGI PEMBANGUNAN PERDESAAN BERKELANJUTAN

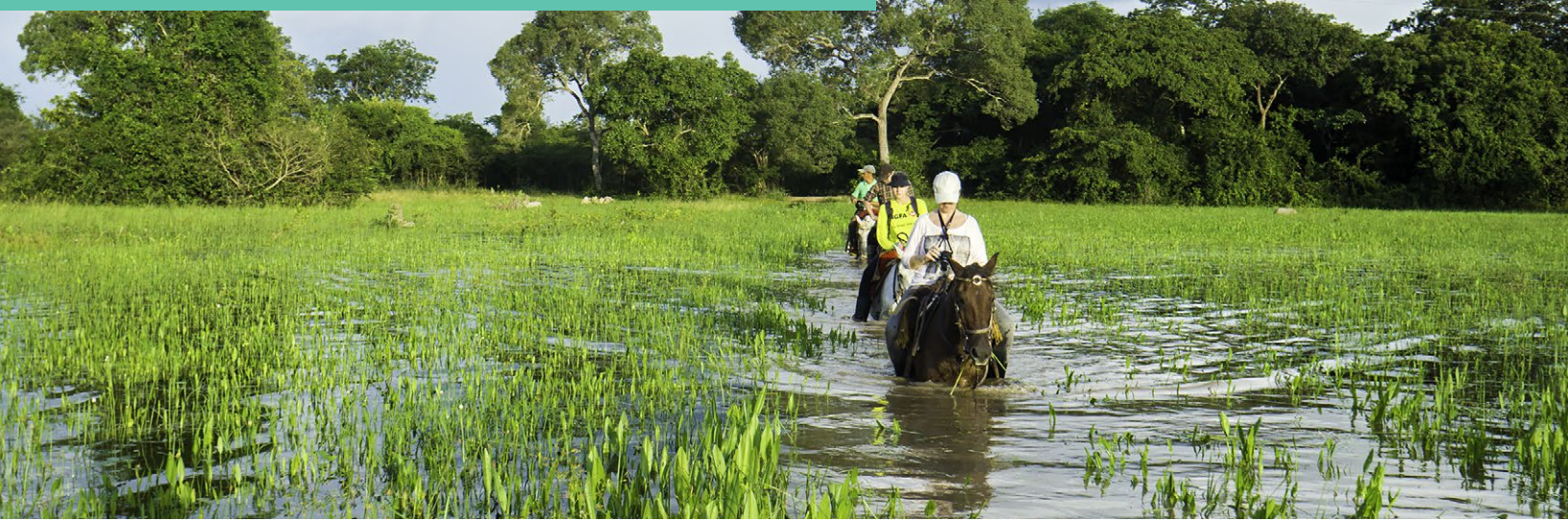
Tipologi Sederhana dari “Jurisdictional Sustainability Working Group” (JSWG)¹¹

Berbagai pendekatan ini umumnya saling berkaitan. Rangkuman ini tidak dimaksudkan untuk lebih mendukung salah satu pendekatan. Sebaliknya, sasarannya adalah memberi kerangka sederhana untuk mengkategorikan berbagai pendekatan dan atributnya

FITUR	NAMA PENDEKATAN			
	RANTAI PASOKAN TRADISIONAL	SELURUH SEKTOR	MANAJEMEN LANSEKAP TERPADU	YURISDIKSI
Unit Kinerja	Lahan tani, perkebunan, Pabrik pengolah (dan pemasok) yang menjual ke satu pembeli	Semua lahan tani, perkebunan, Pabrik Pengolah, di area penghasil tanaman tertentu	Ujung-ke-ujung di seluruh area geografis yang ditentukan	Ujung-ke-ujung di seluruh area geografis yang ditentukan, yang perbatasannya relevan dengan kebijakan
Contoh	Sertifikasi, program sumber pasokan yang dipimpin perusahaan	Pendekatan sisi pasokan, Moratorium penanaman kedelai	Pendekatan daerah aliran sungai	Sertifikasi yurisdiksi, yurisdiksi REDD, inisiatif tingkat negara dan provinsi
Metrik Hutan	HCV, HCS, Legalitas, Tanggal Cut Off Deforestasi	HCV, HCS, Legalitas, Tanggal Cut Off Deforestasi	Kesehatan lanskap: % tutupan hutan, zona vegetasi riparian, konektivitas	Kesehatan lanskap ditambah sasaran resmi, tingkat deforestasi; tingkat referensi; daerah reforestasi; tutupan hutan minimum
Skala Dampak	Kecil	Sedang	Sedang-Sangat besar	Besar-Sangat besar
Peluang bagi perusahaan untuk melaksanakan tanpa lingkungan pemberdaya	Tinggi	Sedang	Sedang	Kecil
Peran Pemerintah	Kecil	Kecil	Bervariasi	Sedang-Besar
Petani Kecil	Sering kali tidak diikutsertakan karena sulit dilibatkan	Sering kali tidak diikutsertakan karena sulit dilibatkan	Diikutsertakan	Diikutsertakan
Berawalnya Upaya	Sering kali dimulai dan dipimpin oleh perusahaan perseorangan	Bergantung pada persetujuan di antara berbagai pembeli	Bergantung pada berbagai pemangku kepentingan di dalam daerah geografis, sering kali tanpa pemerintah	Bergantung pada berbagai pemangku kepentingan di dalam batas wilayah politik, termasuk pemerintah; melanjutkan dan memperbarui kebijakan

¹¹ Kelompok ini beranggotakan Dan Nepstad (Earth Innovation Institute) dan Ruth Nussbaum (Proforest) (ketua bersama), Darrel Weber (RSPO), Jan-Kees Vis (Unilever), Juliana Lopez (Grupo Amaggi), Elly Baroudy (World Bank), William Boyd (Governors' Climate and Forests task force), Lex Hovani (The Nature Conservancy), dan Nienke Stam (IDH)

LAMPIRAN 2 | Studi Kasus



STUDI KASUS MATO GROSSO

PROFIL

- Emisi tahunan rata-rata dari deforestasi: 149 MTCO₂
- Luas Total: 903.366 km²
- Luas Hutan pada 2012: 520.884 km²
- Luas Daerah Produksi: 410.696 km²
- Luas Kawasan Lindung: 191.194 km²
- Jumlah Penduduk: 3.321.196
- Penduduk Perkotaan-Perdesaan: 82% kota, 18% desa

JALUR

- REDD Yurisdiksi (anggota GCF, aturan hukum REDD)
- Endogen

TITIK MASUK

- Penolakan pasar terhadap deforestasi
- Harapan dari REDD
- Kepemimpinan politik (Gubernur Pedro Taques, Blairo Maggi)

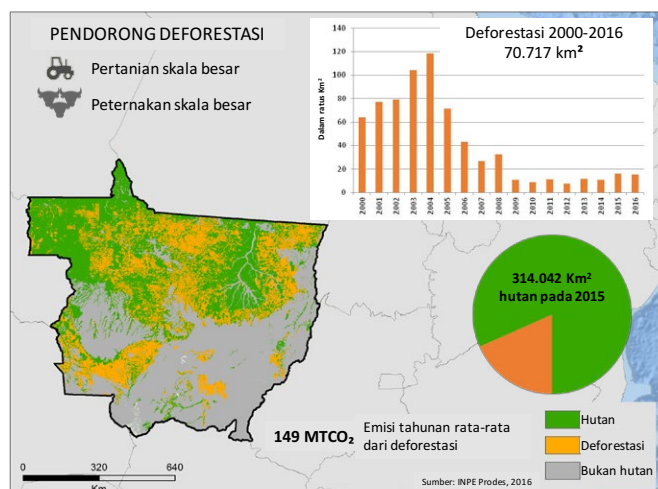
SASARAN SELURUH NEGARA BAGIAN

- Rencana “Produksi, Konservasi, Inklusi” (PCI), target 2020 dan 2030:
 - Pengurangan emisi 4 GtCO₂ (hanya dari karbon hutan)
 - Deforestasi bersih nol; emisi bersih nol pada 2030
 - Penjangkauan ke 100% petani kecil

INSENTIF/STRATEGI BERBAGI BIAYA

Dalam pengembangan

- Kesepakatan pasokan yurisdiksi (dengan Cina, Norwegia, FEFAC)
- Althelia, program kredit pertanian publik, investasi ternak, dana kinerja teritorial
- Perkiraan biaya PCI=USD 10 miliar

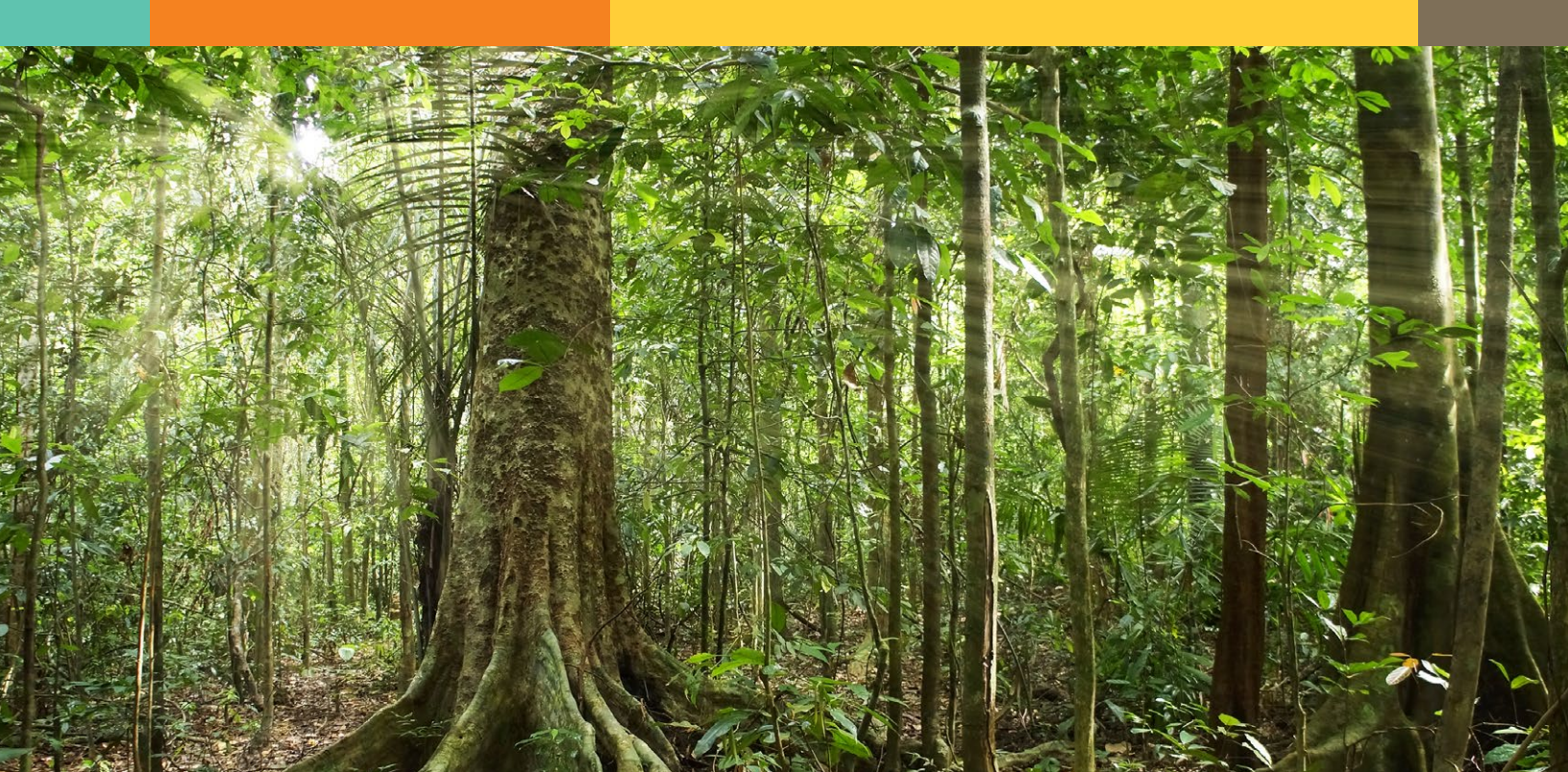


MRV

Versi beta dari platform kinerja *online* sudah diselesaikan

STRUKTUR TATA KELOLA

- Struktur tata kelola baru dibentuk melalui aturan hukum (Keputusan Negara Bagian 468/2016). Kerangka kelembagaan untuk Rencana PCI saat ini sedang direvisi dan struktur yang ada mungkin berubah dalam proses ini.
- Di bawah sistem saat ini, Komite Rencana Negara Bagian (CEEPCI) bertanggung jawab mengawasi PCI dan anggotanya berasal dari masyarakat madani, pemerintah, dan sektor swasta. Direktur Eksekutif berada di bawah CEEPCI dan memimpin pelaksanaan rencana sesuai keputusan yang diambil CEEPCI. Setiap elemen strategi tersebut dipegang oleh lembaga pemerintah yang berbeda: i) “Produksi” di bawah Sekretaris Pengembangan Ekonomi (SEDEC); ii) “Konservasi” di bawah Sekretaris Lingkungan (SEMA); dan iii) “Inklusi” di bawah Sekretaris Pertanian Keluarga (SEAF).



STUDI KASUS KALIMANTAN TENGAH

PROFILE

- Emisi tahunan rata-rata dari deforestasi: 35 MTCO₂
- Luas Total: 157.983 km²
- Luas Hutan pada 2014: 80.181 km²
- Luas Kawasan Lindung: 13.749 km²
- Jumlah Penduduk 2014: 2.439.858
- Penduduk Perkotaan-Perdesaan: 66% kota, 34% desa

JALUR

- Sertifikasi Yurisdiksi
- REDD Yurisdiksi (anggota GCF)

TITIK MASUK

- Penolakan pasar terhadap deforestasi
- Tersisihnya petani kecil dari ekonomi formal
- Dipilih sebagai uji coba oleh RSPO

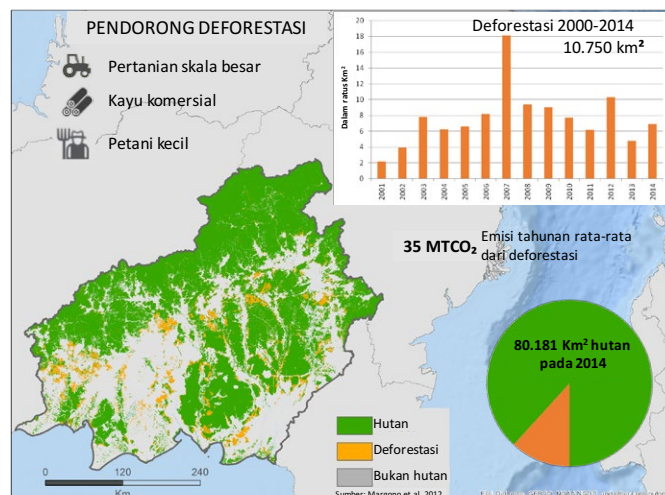
SASARAN SELURUH PROVINSI

- Sasaran seluruh provinsi goals: "Peta Jalan Kalimantan Tengah untuk Pembangunan Perdesaan Rendah Deforestasi yang Meningkatkan Produksi dan Mengurangi Kemiskinan"¹²
- Sasaran tingkat kabupaten/kota belum ditetapkan

INSENTIF/STRATEGI BERBAGI BIAYA

Dalam pengembangan

- Hibah dan investasi perusahaan dalam pemetaan petani kecil
- Mekanisme hibah pembayaran kinerja (*pay-for-performance*)



MRV

- Platform kinerja *online* SIPKEBUM¹³ yang ada di pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

STRUKTUR TATA KELOLA

- Kelompok Kerja (WG) untuk sertifikasi RSPO. Secara khusus:
- Kelompok Kerja Sertifikasi Yurisdiksi (JC) di tingkat Provinsi
- Kelompok Kerja JC di Kabupaten Seruyan
- Kelompok Kerja JC di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Kelompok Kerja JC di Kabupaten Gunung Mas

¹³ Untuk perincian lebih lanjut kunjungi:

<http://inobu.org/en/events/36-events/120-inovasi-bumi-inobu-ministry-of-agriculture-central-kalimantan-a-local-governments-sign-mou-and-launch-sipkebum-a-foundation-for-achieving-sustainable-palm-oil.html> (accessed on Feb. 3, 2017)

¹² Untuk perincian lebih lanjut kunjungi: <http://earthinnovation.org/publications/central-kalimantan-roadmap-to-low-deforestation-rural-development/> (last accessed on Feb. 3, 2017)



STUDI KASUS **ACRE**

PROFIL

- Emisi tahunan rata-rata dari deforestasi: 18 MTCO₂
- Luas Total: 164.221 km²
- Luas Hutan: 148.522 km²
- Luas Kawasan Lindung: 77.744 km²
- Luas Daerah Produksi: 20.615 km²
- Jumlah Penduduk 2016: 816.687
- Penduduk Perkotaan-Perdesaan: 73% kota, 27% desa

JALUR

- Endogen
- REDD Yurisdiksi (anggota GCF, aturan hukum SISA)

TITIK MASUK

- Gerakan sosial (penyadap karet otonom, masyarakat adat) menjadi platform bagi pemerintah
- Harapan dari REDD

SASARAN SELURUH NEGARA BAGIAN

- Tingkat referensi deforestasi di seluruh negara bagian

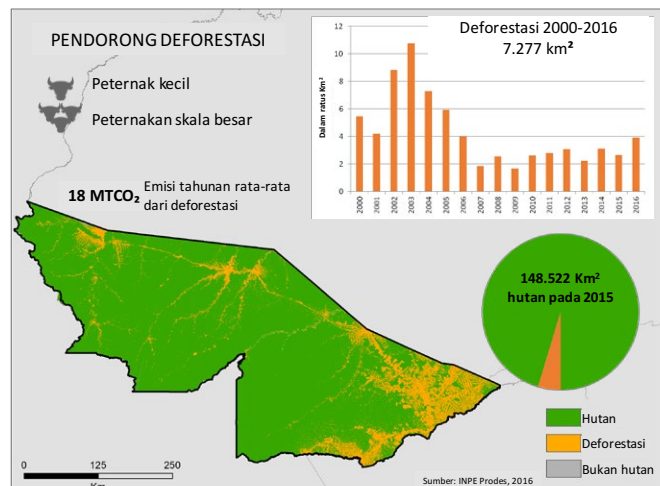
INSENTIF/STRATEGI BERBAGI BIAYA

Dalam pengembangan

- Sistem Insentif untuk Layanan Ekosistem telah menarik dana EUR 25 juta (program Perintis REDD Jerman); BRL 60 juta (Dana Amazon)
- Rencana pertumbuhan hijau telah menarik investasi swasta (BRL 40 juta) bagi industri berkelanjutan melalui Kemitraan Masyarakat Swasta-Publik

MRV

- Platform kinerja teritorial online akan segera diadakan oleh pemerintah Acre



STRUKTUR TATA KELOLA

- Sistem Negara Bagian untuk Layanan Lingkungan (SISA) menciptakan mandat hukum untuk pembentukan beberapa institusi, yang kebanyakan beroperasi di dalam Lembaga Lingkungan Negara Bagian (SEMA).
- Di antaranya yaitu: i) Institut Perubahan Iklim (IMC), yang bertanggung jawab membuat peraturan, pendaftaran, dan pengendalian untuk pelaksanaan aturan hukum SISA dan memastikan integritasnya; ii) Komite Sains, yang bertanggung jawab mengawasi integritas teknis dan keilmuan tingkat referensi, sistem pemantauan, dan pengkajian pengurangan emisi; serta Perusahaan Pembangunan Ekosistem (CDSA), yang beroperasi sebagai entitas publik-swasta dengan tugas menjadikan program insentif negara bagian layak secara keuangan, dengan menarik investasi dari sektor swasta dan donor publik ke dalam sistem. Perincian lebih lanjut mengenai struktur SISA tersedia di sini.¹⁴

¹⁴ Untuk perincian lebih lanjut kunjungi: <http://imc.ac.gov.br/wp/wp-content/uploads/2016/09/SISA.pdf> (last accessed on Feb. 3, 2017)